



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TAUFIK HIDAYAT**
2. Jabatan : **WAKIL MENTERI**
3. NHK : **986596**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **59.748.235.200**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 581 m2/498 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , Rp. 18.308.555.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 945 m2/49 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 5.944.092.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 3.000 m2/3.186 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 26.283.438.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1.299 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 8.153.425.000
5. Tanah Seluas 897 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 832.000.000
6. Tanah Seluas 10 m2 di KAB / KOTA KARAWANG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 226.725.200

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **802.200.000**

1. MOBIL, VOLKSWAGEN TIGUAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 451.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 11.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **994.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	14.214.550.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.312.333.831
F. HARTA LAINNYA	Rp.	5.992.615.570
Sub Total	Rp.	89.064.434.601
III. HUTANG	Rp.	8.022.216
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	89.056.412.385

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.